

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A .Bazaar Harahap, *Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan*, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015
- A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2016
- Dyah Ayu Widowati, dkk, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, Yogyakarta : Amongkarta, 2014.
- Dewi Wulansari, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.
- Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Jonggol, 2010
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju. 2003.
- I Gede AB Wiranataa, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Thesis Serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2011

Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, Yogyakarta : Deepublish, 2017

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017

B. JURNAL / ARTIKEL

Faiq Tobroni, Memperkuat Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012), *Jurnal Konsitusi* : Vol. 10, No. 3, 2013.

Jawahir Thontowi, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 1 No. 20, 2013.

Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta : Komnas HAM, 2016.

Nor Qomariah, Arah Baru Kebijakan Dan Penegakan Hukum Konservasi SDA Hayati Dan Ekosistemnya: Pengakuan Hukum Adat Dan Penegakan Hukum Adat Sebagai Alternatif Perlindungan Kawasan Pelastarian Alam, *Jakarta : Indonesian Center For Environmental Law*, 2019.

Safrin Salam, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Widiyanto, Menyegerakan Ketetapan Wilayah/Hutan Adat : Profil Masyarakat Hukum Adat Untuk Implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35 Tahun 2012, *Jakarta : HuMa*, 2019.

Zayanti Mandasari, Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi), *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 2, 2014, hal. 229.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan daerah provinsi jambi no 1 tahun 2020 tentang tata kelola lahan gambut.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas.